

PERAN PANCASILA DALAM MENEKAN DISINTEGRASI BANGSA ATAS POTENSI PERPECAHAN PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT

Syarifah Aini¹; Desi Devrika Devra²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Pekanbaru 28298
E-mail : desi.devrikadevra@gmail.com (Koresponding)

Abstract: The purpose of this research is to understand the role of Pancasila in suppressing national disintegration, the causes of national disintegration, and the issues related to national disintegration, as it has been found that the topic of national disintegration is always a hot discussion due to its significant impact that can fragment the unity and cohesion of society as the subjects that form an entity known as a state. This type of research is normative and descriptive in nature, and the approach used is a conceptual approach. The data obtained is from library sources and internet media. The source of data used is secondary data. The data collection technique is literature study. The analysis of this research data is qualitative analysis, and it uses deductive reasoning for drawing conclusions. From the research, the conclusion is obtained that the role of Pancasila in suppressing national disintegration is that Pancasila functions as an ideology; ideology serves to provide.

Keywords: *Pancasila, Disintegration, Nation, Unity, Society*

Disintegrasi bangsa menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius jika tidak disikapi secara baik dan benar oleh pemerintah dan masyarakat. Tanggungjawab untuk memecahkan permasalahan tentang disintegrasi tidak dapat diserahkan saja oleh pemerintah namun semua komponen pembentuk bangsa termasuk kita sebagai masyarakat. Lalu bagaimana peran Pancasila dalam menekan disintegrasi bangsa, apakah dapat berjalan sempurna. Nilai Pancasila sebagai solusi tentang permasalahan disintegrasi bangsa dapat berjalan sempurna jika penerapan nilainya dilakukan secara konsisten pada kehidupan bernegara. Konflik tentang perpecahan tidak boleh dibiarkan begitu saja karena akan berdampak pada kekacauan yang berkepanjangan yang akan membahayakan bagi keutuhan bangsa Indonesia. (Handitya, 2020).

Terkadang *issue* perpecahan sering digunakan beberapa oknum yang sengaja ingin memecah belah bangsa ini karena ingin mengambil keuntungan dari kondisi yang demikian itu. Semakin bangsa ini terpecah belah maka semakin mudah kekuasaan asing untuk mengintervensi ke dalam bangsa ini. Pancasila merupakan solusi

terbaik untuk tetap mempertahankan keutuhan bangsa ini. Adapun strategi Pancasila dalam menekan disintegrasi bangsa melalui penerapan nilai di setiap silanya (Handitya, 2020).

Secara filosofis, disintegrasi nasional ini dapat dipahami sebagai proses mengikis keutuhan dan melemahkan ikatan persaudaraan bangsa Indonesia yang mengancam eksistensi nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Persoalan disintegrasi nasional ini bukan sekedar realitas sosial yang bersifat superfisial, melainkan menjadi fenomena yang semakin mengakar dan menjadi manifestasi krisis mendalam dalam struktur kebangsaan yang membutuhkan kajian filosofis yang komprehensif. (Sari & Sundawa, 2025)

Kelima sila dalam Pancasila pada hakekatnya merupakan sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai filsafat disebabkan karena Pancasila merupakan hasil dari refleksi intelektual yang mendalam oleh para *founding father*. Sehingga filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai suatu keterkaitan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerjasama antara tiap sila dengan sila lainnya sebagai satu

kesatuan yang utuh guna mencapai tujuan tertentu. Pancasila sebagai filosofi dasar berbangsa dan bernegara, memberikan konsep yang dapat dijadikan kerangka epistemologis yang efektif dalam membedah akar permasalahan disintegrasi yang terus muncul dan berkembang seiring perjalanan berbangsa dan bernegara. (Sari & Sundawa, 2025)

Melalui perspektif filsafat Pancasila, disintegrasi nasional dapat dipahami sebuah proses melemahkan ikatan kesatuan bangsa yang dibangun atas prinsip-prinsip persaudaraan, kemanusiaan, dan keadilan, yang melahirkan krisis kesadaran akan hakikat kebersamaan dalam keberagaman sebagai suatu bangsa. Nilai-nilai dalam tiap sila Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kebangsaan luhur yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kompetensi setiap sila dalam Pancasila mampu memberikan dimensi analisis tersendiri mengenai permasalahan disintegrasi bangsa, mulai dari pentingnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial. (Sari & Sundawa, 2025)

Untuk menjawab persoalan disintegrasi bangsa, setiap elemen masyarakat dan pemerintah harus memahami serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung di setiap silanya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach*. Data yang didapatkan dari sumber perpustakaan dan media internet. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka. Analisis penelitian data ini adalah analisis secara kualitatif, dan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif.

HASIL

Peran Pancasila Dalam Menekan Disintegrasi Bangsa

Nilai-nilai Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku generasi muda di Indonesia. Sebagai

ideologi negara yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara generasi muda memandang diri mereka sebagai warga negara dan berinteraksi dalam masyarakat. (Sandy)

Nilai-nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (Yanto, 2016) Sila Ketuhanan yang maha esa, memberikan pemahaman kepada kita bahwa terciptanya kita sebagai manusia yang hidup sebagai rakyat yang berlindung pada naungan sebuah negara harus dapat berkeyakinan bahwa Tuhan telah menggariskan kita sedemikian rupa sehingga sudah menjadi kewajiban kita sebagai rakyat menjaga keutuhan dalam persatuan bangsa. Jika setiap rakyat berfikir demikian niscaya segala bentuk pemikiran tentang perpecahan tidak akan pernah terbayangkan. Negara yang kuat karena memiliki rakyat yang kuat dan setia menjunjung tinggi kebersamaan untuk mengatasi permasalahan yang sedang didera oleh bangsa. Walaupun berat dalam mewujudkan hal seperti itu akan tetapi keyakinan tentang ikut campur tangan Tuhan yang menggariskan kita untuk hidup di bawah naungan negara harus tetap diyakinkan. (Handitya, 2020)

Sila Kedua berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, sila ini bermakna bahwa masyarakat Indonesia harus mengakui kedudukan manusia yang sama dan saling menghormati hak dan kewajiban setiap orang. (Hutabarat & Dkk, 2022) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mampu memberikan dasar keyakinan pada semua masyarakat bahwa keinginan mewujudkan persatuan dan kesatuan harus dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan ini. Seharusnya tidak hanya terbatas pada satu negara saja, nilai persatuan merupakan suatu konsep yang harus dipertahankan dalam kehidupan dunia sehingga perpecahan, peperangan, keinginan saling

menghancurkan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain tidak akan pernah terjadi. Segala bentuk disintegrasi akan menjadi awal dari kerusakan kehidupan ini. Jika dalam hati kita ada keinginan untuk memanusialkan manusia lain maka tidak akan terjadi perselisihan karena perselisihan bentuk dari perbedaan pandangan akan selalu dapat diselesaikan secara baik. Keinginan pada diri masing-masing manusia dalam mewujudkan semangat untuk bersatu harusnya ditumbuhkan yang akan membentuk jiwa persatuan dan kesatuan yang sangat dibutuhkan dalam mengelola bangsa ini. (Handitya, 2020)

Sila persatuan dan kesatuan, merupakan sila yang mengandung prinsip sangat relevan dengan konsep integrasi bangsa. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya : Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengedepankan semangat nasionalisme, patriotisme, gotong royong, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menghormati sistem demokrasi dengan menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara bertanggung jawab, serta menghargai pendapat dan aspirasi orang lain. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing, serta menuntut hak-hak sosial secara adil dan wajar. (Lumintang, Nuraini, & Ana, 2023) Sebagai salah satu sila yang memberikan koridor bagi masyarakat Indonesia agar selalu menjaga semangat persatuan dalam konsep kebersamaan karena kita memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan secara menyeluruh. Sernangat kebersamaan ini harus mampu menepiskan segala bibit-bibit perpecahan yang mungkin muncul secara alami ataupun memang dibentuk secara sengaja karena ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Sekarang sudah waktunya kita menjadi agen yang mendorong untuk mewujudkan persatuan bangsa dengan cara memberikan pengetahuan dan menyiarkan semangat persatuan kepada orang di sekitar kita. Melalui cara itulah kira ikut serta dalam mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan maju.

(Handitya, 2020)

Adapun nilai keempat yang terkandung dalam Pancasila adalah prinsip *Good Governance*. Sebuah Negara digagas pembentukannya oleh tokoh-tokoh yang memiliki reputasi dan integritas diri yang tinggi menuju Negara yang baik. (Sulaiman, 2017) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebagai konsep pengelolaan negara yang ideal. Pengaruh pemimpin sekaligus pola kepemimpinan sangat menentukan bagaimana negara ini akan dibawa kemana. Salah satu yang menjadi pemicu konflik disintegrasi bangsa adalah kecemburuan sosial yang terjadi karena mereka merasa tidak dipedulikan. Rakyat menghendaki figur pemimpin yang mampu mengelola bangsa ini dengan pola kepemimpinan yang benar dan bijaksana. Pemimpin yang bijaksana harus mampu melihat serta merasakan keluh kesah rakyatnya. Bagaimana cara pemimpin mengetahui setiap keluh kesah rakyat tidak lain dengan dia dekat dengan rakyat tersebut. Dengan pemimpin dekat terhadap rakyatnya segala bentuk kebutuhan yang diinginkan dapat dipenuhi dan diupayakan. (Handitya, 2020)

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pemerintah Indonesia tidak boleh membeda-bedakan perlakuannya kepada masyarakat Indonesia. Karena banyaknya perbedaan yang terdapat di Indonesia, seharusnya pemerintah dapat bersikap lebih adil dan bijaksana dalam bertindak. Pencerminan sila kelima ini dapat dilihat dari sikap dan perbuatan, diantaranya: a. Semangat Kegotong-Royongan Besikap secara suka rela dengan bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan yang diinginkan. b. Menjaga Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Dapat membedakan mana yang hak dan kewajiban, sekaligus dapat melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu sebagai warga negara Indonesia yang beradab. (Nurhikmah, Nugrahaningtyas, & Pamungkas, 2021) Sila keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia, sebagai rujukan membentuk suatu negara. Nilai keadilan harus selalu diupayakan walaupun terwujudnya nilai keadilan pada masing-masing manusia sangat berbeda dan akan sulit diwujudkan. Permasalahan disintegrasi biasanya muncul dari tidak terciptanya keadilan bagi rakyat karena merasa tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang didapatkan orang lain. Maka jika ingin menghindari konflik disintegrasi bangsa pemerintah harus mengupayakan untuk memberikan kebutuhan utama pada semua rakyat baik yang berada dekat dengan pemerintah maupun di daerah yang mungkin sangat jauh dari pemerintah. Dengan upaya tersebut akan menepis anggapan bahwa tidak ada satu rakyatpun yang lepas dari perhatian pemerintah sebagai wakil dari negara ini yang diberikan mandat untuk melakukan pengelolaan negara. (Handitya, 2020)

Penyebab Terjadinya Disintegrasi Bangsa

1. Pengaruh ideologi selain pancasila

Ideologi merupakan seperangkat gagasan atau pemikiran yang merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi daripada pandangan hidup bangsa yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir suatu sistem yang teratur yang menjadi pegangan dan perjuangan yang dicita-citakan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Ideologi mengandung kegunaan untuk memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa. (Faradila, Holilulloh, & Adha) Munculnya ideologi baru yang berupaya mempengaruhi pemahaman pada rakyat Indonesia juga menjadi sebuah tantangan tersendiri terhadap eksistensi Pancasila. Beberapa ideologi yang berkembang antara lain komunisme, kapitalisme, nasionalisme radikal, Islam fanatisme dan aliran ideologi lainnya. Perkembangan ideologi-ideologi tersebut dapat menyebabkan lemahnya keyakinan masyarakat pada ideologi Pancasila yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Semakin ideologi selain Pancasila dibiarkan berkembang semakin besar pula

peluang runtuhnya bangsa ini karena banyak masyarakat yang sudah tidak meyakini kebenaran Pancasila sebagai cara pandang bangsa ini. (Handitya, 2020)

Masyarakat sebagai obyek pemaparan ideologi baru mempunyai sifat pasif, beberapa cenderung tidak menolak namun kebanyakan mudah terpengaruh oleh ajaran tersebut. Hal inilah yang sangat perlu diwaspadai dan cepat disikapi terutama oleh pemerintah harus lebih aktif memberikan penyuluhan kepada warga juga membentuk tim siber guna menangkal beberapa pihak yang mencoba mengembangkan ideologi baru di negeri ini. Harapan Pancasila untuk menjadi satu-satunya ideologi harus diwujudkan karena nilai Pancasila telah dirumuskan secara sempurna. (Handitya, 2020).

2. Sistem politik yang tidak sehat

Sistem politik merupakan salah satu cara yang paling ideal sampai saat ini untuk mengarahkan masyarakat guna mencapai tujuan bemeagara. Peran politik sering kali disalahgunakan beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi, misalnya untuk tujuan memperkaya diri sendiri, untuk mewujudkan kepentingan golongan dan untuk tujuan di luar dari tujuan negara paada umumnya. Seringkali makna politik disalah artikan oleh masyarakat bahwa politik sendiri identik dengan kekotoran. Persepsi masyarakat yang demikian harus kita berikan pemahaman agar pola pikir mereka menjadi benar. Politik sebagai sarana alat mengakomodasi kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat itu sendiri sehingga tanpa menggunakan politik perubahan terhadap sistem sosial masyarakat akan sulit untuk dilakukan. (Handitya, 2020)

Perkembangan sistem politik akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak sekali pihak yang terlihat hanya menggunakan atribut politik sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, yang saat kekuasaan itu diperoleh maka politik digunakan sebagai sarana melenggangkan kekuasaan tersebut. Itulah sebagai sebuah pertanda bahwa sistem politik sedang pada

keadaan yang tidak sehat. Karena kehidupan politik yang sedang sakit ini maka kekacauan akan terus terjadi. Pertarungan antara pihak satu dengan pihak lain terus terjadi terlihat dari upaya saling menjatuhkan hanya karena adanya perbedaan pandangan politik. Hingga masyarakat saat ini dapat menilai para kaum elite yang sedang berada di tajuk kepemimpinan sudah tidak ada waktu lagi memikirkan kepentingan rakyat yang sedang dipimpinya. (Handitya, 2020).

3. Pengelolaan kekayaan alam yang tidak seimbang

Indonesia dengan bentang kepulauan yang luas mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kekayaan alam ini jika dikelola secara benar dan efektif tentu akan memberikan kesejahteraan buka hanya di tingkat daerah saja namun akan memberikan kesejahteraan pada skala nasional. Di sisi lain, kekayaan alam yang dimiliki menjadi mimpi buruk bagi bangsa ini jika dalam pengelolaannya terjadi ketimpangan. Ketimpangan itu dapat terjadi jika pemerintah tidak merumuskan kebijakan yang sempurna untuk mengeksplorasi guna mengambil manfaat dari kekayaan alam pada masing-masing daerah. (Handitya, 2020)

Kekayaan alam yang tersimpan di masing-masing daerah harus dimanfaatkan untuk dapat menciptakan kemakmuran terutama bagi daerah yang mempunyai kekayaan alam itu. Konsep seperti ini bahwa kesejahteraan daerah harus diwujudkan secara maksimal sehingga kesejahteraan nasional mendapat dukungan dari seluruh daerah. Bagaimana kesejahteraan nasional dapat terwujud jika masih terdapat ketimpangan dalam mengelola kekayaan alam di daerah. Kecemburuan sosial sering terjadi karena di daerah masih menganggap pengelolaan belum dapat dilaksanakan secara baik dan berdasarkan asas keadilan menuju pemerataan. Pemerataan juga akan dapat terwujud jika masing-masing daerah telah menyadari kepentingan nasional menjadi agenda penting yang harus diwujudkan. (Handitya, 2020).

4. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata

Dalam mengejar negara yang maju maka pembangunan infrastruktur sangat diperlukan guna mendukung tujuan itu. Pembangunan terus dilakukan walaupun terkadang dalam pelaksanaannya sering mengabaikan faktor lain dan dampak yang ditimbulkan. Seperti dalam pembangunan infrastruktur seperti wilayah industri dan perkantoran tentu akan mengabaikan kelestarian lingkungan sebagai dampak negatifnya. Dampak sosial juga akan muncul jika dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur mengabaikan asas pemerataan. Kecemburuan sosial akan terjadi karena dipihak lain akan merasa diabaikan oleh sentuhan pembangunan nasional. Akibatnya disintegrasi akan terbentuk dan dapat mengancam semangat persatuan dan kesatuan bangsa. (Handitya, 2020)

Infrastruktur merupakan sarana penunjang bagi perubahan ekonomi pada wilayah tertentu sehingga angka kesejahteraan sosial dapat tercapai. Persoalan yang sering terjadi bahwa pembangunan infrastruktur sering kali dilaksanakan secara abai dan kurang matang. Banyak oknum dari pejabat pemerintahan sering memainkan dan mengambil keuntungan dari proyek pembangunan infrastruktur. Sering juga proyek pelaksanaan tidak diberikan secara adil dengan memainkan tender untuk orang-orang yang dekat dengan pemerintahannya saja. Sebagai efek dari adanya hal tersebut maka sektor swasta tidak dapat bersaing secara bersih dan sehat. Banyaknya sikap culus dari beberapa pihak inilah yang sering merenggut mutu dari pembangunan infrastruktur. (Handitya, 2020)

5. Lambannya kemajuan ekonomi

Tingkat kestabilan ekonomi sangat berpengaruh maju dan tidaknya suatu negara. Semakin ekonomi stabil dan terus berkembang maka negara akan menjadi negara yang kuat dan berpengaruh secara mendunia. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi beberapa faktor yang

mendukung seperti kebijakan pemerintah yang mendukung tingkat kestabilan ekonomi, persaingan pasar yang sehat, daya beli masyarakat yang baik serta sistem ekonomi yang sempurna. Disamping faktor internal dalam negara juga terdapat pengaruh dari faktor eksternal seperti perubahan ekonomi secara global, perkembangan dunia yang tidak dapat diikuti oleh negara ini dan kebijakan-kebijakan moneter internasional. (Handitya, 2020)

Kemajuan ekonomi yang berjalan lambat sangat berpengaruh bagi kehidupan bernegara yaitu sulitnya bangsa ini berkembang menyesuaikan kemajuan dengan negara-negara lain. Hal ini juga akan memberikan dampak negatif kehidupan ekonomi dalam negeri akan melemah. Jika ekonomi semakin melemah negara ini akan defisit karena tidak ada keseimbangan ekonomi. Daya saing perekonomian juga akan kacau yang akan menyebabkan perekonomian rakyat semakin terpuruk. Dampak lain yang mungkin akan muncul secara sosial rakyat akan sulit mempercayai pemerintah untuk mengelola negeri ini. Karena lemahnya kepercayaan rakyat pada pemerintahannya sering kali hal ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain yang ingin memecah belah bangsa ini. Maka dari itu sistem untuk mendorong kemajuan ekonomi harus difikirkan secara baik agar tidak menimbulkan kekacauan kehidupan berbangsa. (Handitya, 2020)

6. Menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat

Toleransi merupakan nilai fundamental yang sejak dini diajarkan dalam pendidikan dasar sebagai upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan mencegah konflik akibat perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Sikap saling menghargai dan kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain menjadi kunci dalam menekan gesekan kepentingan individu maupun kelompok, sehingga toleransi tidak hanya bersifat konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun, realitas saat ini menunjukkan

bahwa nilai toleransi semakin tergerus, di mana perbedaan pandangan yang kecil sering berkembang menjadi konflik besar dan berkepanjangan. Prinsip toleransi juga mengandung makna penghormatan terhadap kebebasan berpikir dan bersikap selama tidak melanggar norma sosial yang disepakati. Di era digital, kemudahan akses informasi dan komunikasi justru menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, manipulasi opini publik, dan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang memicu perpecahan sosial. Oleh karena itu, penguatan toleransi melalui pendidikan, literasi digital, dan keteladanan sosial menjadi sangat mendesak untuk menjaga kohesi sosial dan persatuan bangsa (Handitya, 2020).

7. Figur pemimpin yang kurang ideal

Suatu organisasi yang ingin berkembang memerlukan pemimpin yang ideal, demikian pula negara yang membutuhkan figur presiden yang mampu menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan secara efektif. Presiden di Indonesia dituntut memiliki kemampuan memimpin dan memengaruhi rakyat agar kehidupan bernegara berjalan sebagaimana mestinya, di mana pengaruh tersebut akan diterima dengan baik apabila idealisme kepemimpinan tetap terjaga. Idealisme pemimpin dipengaruhi oleh faktor internal seperti kecakapan memimpin, intelektualitas, dan pengalaman, serta faktor eksternal berupa sistem politik dan pengaruh lingkungan sekitarnya (Handitya, 2020). Pemimpin yang kurang ideal cenderung membentuk sikap apatis di tengah masyarakat, terutama ketika komunikasi antara pemimpin dan rakyat tidak berjalan efektif, sehingga visi dan tujuan kepemimpinan tidak tersampaikan secara konsisten. Kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan publik dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemimpin. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin yang berintegritas dan berkarakter kuat menjadi sangat penting, karena pemahaman

masyarakat terhadap kriteria pemimpin ideal akan memudahkan pengambilan keputusan politik yang rasional dan bertanggung jawab (Handitya, 2020).

Permasalahan Disintegrasi Bangsa

Disintegrasi bangsa merupakan salah satu persoalan serius yang berpotensi memicu konflik internal dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Disintegrasi dapat dipahami sebagai kondisi melemahnya persatuan antar komponen pembentuk bangsa yang berujung pada perpecahan dan ancaman terhadap keutuhan negara. Isu ini menjadi perhatian penting karena dampaknya yang besar dalam merusak persatuan dan kesatuan masyarakat sebagai fondasi berdirinya negara. Disintegrasi dapat terjadi secara alami akibat perbedaan yang tidak dikelola dengan baik, maupun secara sengaja melalui strategi pihak-pihak tertentu yang ingin merusak integrasi nasional (Handitya, 2020).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah geografis yang luas memiliki keragaman budaya, sosial, dan karakter masyarakat yang sangat kompleks. Perbedaan tersebut kerap memicu gesekan pola pikir antar kelompok masyarakat apabila tidak disikapi secara bijaksana. Kondisi geografis yang beragam juga membentuk karakter masyarakat yang berbeda-beda, seperti masyarakat pesisir dan pegunungan, yang secara tidak langsung memengaruhi cara pandang dan perilaku sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan kepemimpinan yang mampu memahami serta mengelola perbedaan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik yang meluas (Handitya, 2020).

Pengelolaan bangsa yang besar seperti Indonesia menuntut strategi yang tepat untuk menjaga keutuhan nasional. Konflik internal yang terjadi dari masa ke masa umumnya dipicu oleh ketimpangan sosial, perbedaan pandangan, serta ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ketimpangan ini semakin berbahaya apabila dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi

atau politik, sehingga memperparah konflik dan menyulitkan penyelesaiannya.

Meskipun demikian, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa nilai gotong royong, budaya ketimuran, dan semangat kebersamaan yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Nilai-nilai ini menjadi peluang besar dalam membangun dan memperkuat integrasi nasional, meskipun menghadapi tantangan dari faktor internal maupun pengaruh globalisasi. Integrasi bangsa pada dasarnya dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, memiliki kepedulian dan komitmen yang sama dalam menjaga persatuan.

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan dapat diraih melalui semangat kebersamaan dan pengesampingan egoisme demi tujuan bersama. Kesadaran kolektif inilah yang harus terus dijaga dan direaktualisasikan agar ancaman disintegrasi dapat diminimalkan. Dengan kerja sama, kepemimpinan yang bijaksana, dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, persatuan dan kesatuan Indonesia dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Peran Pancasila dalam Menekan Disintegrasi Bangsa

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran strategis dan multidimensional dalam menekan potensi disintegrasi bangsa Indonesia. Dalam perspektif teori ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai *state ideology* yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam mengatur relasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Menurut Althusser (2014), ideologi berperan sebagai alat pembentuk kesadaran kolektif yang memengaruhi cara individu memahami realitas sosialnya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila membentuk kesadaran kebangsaan yang menempatkan persatuan sebagai tujuan bersama di tengah keberagaman.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

menjadi fondasi moral dan spiritual dalam menjaga integrasi bangsa. Teori *moral community* dari Durkheim menyatakan bahwa nilai-nilai religius mampu memperkuat solidaritas sosial apabila dikelola secara inklusif (Durkheim, 2013). Pancasila tidak memaksakan satu agama tertentu, tetapi mengakui keberadaan Tuhan sebagai nilai transendental yang menjadi titik temu antarumat beragama. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *religious pluralism* yang menekankan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan sebagai prasyarat stabilitas sosial (Habermas, 2011). Dengan demikian, sila pertama berfungsi sebagai benteng ideologis terhadap radikalisme dan fanatisme sempit yang kerap menjadi pemicu konflik dan disintegrasi.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memperkuat dimensi integrasi sosial melalui prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Teori keadilan sosial John Rawls (2005) menegaskan bahwa stabilitas suatu masyarakat hanya dapat tercapai apabila prinsip keadilan dijalankan secara adil dan rasional. Dalam konteks Indonesia, ketidakadilan struktural sering kali memicu kecemburuan sosial yang berujung pada konflik horizontal. Implementasi nilai kemanusiaan dalam Pancasila mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini relevan dengan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa negara dengan tingkat keadilan sosial yang tinggi cenderung memiliki risiko konflik internal yang lebih rendah (UNDP, 2023).

Sila Persatuan Indonesia menjadi inti ideologis dalam menekan disintegrasi bangsa. Teori *social cohesion* menyatakan bahwa persatuan nasional terbentuk melalui rasa memiliki, kepercayaan sosial, dan partisipasi aktif warga negara (Chan et al., 2020). Pancasila menginternalisasikan nilai persatuan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan bangsa. Dalam konteks globalisasi dan arus informasi digital yang masif, nilai persatuan berfungsi sebagai *buffer ideology*

untuk menahan fragmentasi sosial akibat politik identitas dan polarisasi opini publik. Penelitian terbaru oleh OECD (2022) menunjukkan bahwa negara dengan ideologi nasional yang kuat lebih resilien terhadap konflik sosial berbasis identitas.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan memiliki relevansi kuat dengan teori *good governance* dan demokrasi deliberatif. Menurut teori demokrasi deliberatif Habermas (2011), legitimasi politik diperoleh melalui proses musyawarah yang inklusif dan rasional. Ketika pemerintah gagal menjalankan prinsip musyawarah dan keadilan prosedural, maka kepercayaan publik akan menurun dan berpotensi memicu disintegrasi. Dalam konteks Indonesia, praktik demokrasi yang transaksional dan elitis sering kali menimbulkan ketegangan sosial. Pancasila menawarkan solusi melalui kepemimpinan yang bijaksana, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Studi terbaru oleh World Bank (2024) menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan pilar utama dalam menekan disintegrasi yang bersumber dari ketimpangan ekonomi dan pembangunan. Teori *relative deprivation* menjelaskan bahwa konflik sosial muncul bukan semata karena kemiskinan, tetapi karena ketimpangan dan perasaan diperlakukan tidak adil (Gurr, 2015). Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, apabila tidak dikelola secara adil, berpotensi melahirkan tuntutan separatisme dan konflik horizontal. Oleh karena itu, implementasi sila kelima melalui pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, dan perlindungan kelompok rentan menjadi kunci dalam menjaga integrasi nasional. Data Bappenas (2024) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat ketimpangan rendah cenderung memiliki stabilitas sosial yang lebih baik.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa tantangan disintegrasi semakin kompleks akibat pengaruh ideologi transnasional, sistem politik yang tidak sehat, serta derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Teori *ideological contestation* menyebutkan bahwa ideologi negara akan melemah apabila tidak direproduksi secara sistematis melalui pendidikan dan kebijakan publik (Heywood, 2021). Dalam konteks ini, penguatan pendidikan Pancasila, literasi digital, dan narasi kebangsaan menjadi strategi penting untuk menghadapi penetrasi ideologi yang bertentangan dengan nilai nasional.

Menurunnya toleransi sosial dan meningkatnya polarisasi masyarakat juga menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa. Teori *contact hypothesis* dari Allport yang diperbarui dalam studi kontemporer menunjukkan bahwa interaksi sosial yang setara dan berkelanjutan mampu mengurangi prasangka dan konflik (Pettigrew & Tropp, 2018). Pancasila menyediakan kerangka normatif untuk membangun interaksi sosial yang harmonis melalui nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Tanpa internalisasi nilai-nilai tersebut, teknologi dan media sosial justru berpotensi mempercepat disintegrasi melalui penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Figur kepemimpinan juga menjadi faktor krusial dalam menjaga integrasi bangsa. Teori *transformational leadership* menekankan bahwa pemimpin yang visioner, berintegritas, dan mampu menjadi teladan akan meningkatkan kepercayaan publik dan kohesi sosial (Northouse, 2022). Pancasila menuntut pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknokratis, tetapi juga berkarakter kebangsaan dan berorientasi pada kepentingan umum. Kepemimpinan yang gagal mencerminkan nilai Pancasila cenderung memicu sikap apatis dan delegitimasi kekuasaan, yang pada akhirnya memperbesar risiko disintegrasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan instrumen ideologis yang relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan disintegrasi

bangsa di era modern. Dengan dukungan teori-teori sosial, politik, dan ekonomi kontemporer, dapat disimpulkan bahwa penguatan dan implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten merupakan strategi paling efektif untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai warisan historis, tetapi juga sebagai ideologi hidup yang harus terus direaktualisasikan sesuai dengan dinamika zaman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah disintegrasi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan relevan dalam mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai setiap sila Pancasila berperan sebagai perekat sosial yang menjaga persatuan di tengah keberagaman dan tantangan global. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan moral dalam memperkuat kesadaran kolektif kebangsaan, sementara sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar harmoni sosial. Sila Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya nasionalisme inklusif, didukung oleh sila Kerakyatan yang menekankan kepemimpinan partisipatif dan bijaksana. Sila Keadilan Sosial menegaskan pemerataan dan keadilan sebagai kunci stabilitas nasional. Dengan demikian, penguatan internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan menjadi langkah utama dalam menjaga keutuhan NKRI.

DAFTAR RUJUKAN

- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Althusser, L. (2014). *Ideology and ideological state apparatuses*:

- Essays towards a Marxist theory*. London: Verso.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). *Laporan pembangunan Indonesia 2024: Ketimpangan wilayah dan stabilitas sosial*. Jakarta: Bappenas.
- Chan, J., To, H. P., & Chan, E. (2020). Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research. *Social Indicators Research*, 149(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02152-3>
- Durkheim, E. (2013). *The elementary forms of religious life*. New York: Free Press.
- Faradila, A. H., Holilulloh, & Adha, M. M. (n.d.). Pengaruh Pemahaman Ideologi Pancasila Terhadap Sikap Moral Dalam Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila. 6.
- Gurr, T. R. (2015). *Why men rebel*. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
- Habermas, J. (2011). *The structural transformation of the public sphere*. Cambridge: Polity Press.
- Handitya, B. (2020). Pendidikan Pancasila. Semarang: Magna Raharja Tama.
- Heywood, A. (2021). *Political ideologies: An introduction* (7th ed.). London: Red Globe Press.
- Hutabarat, D. T., & Dkk. (2022). Memahami Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Ideologi dan Dasar Negara. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, 3.
- Lumintang, G. S., Nuraini, R. P., & Ana, S. M. (2023). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. *Jurnal Indigenous Knowledge*, 5.
- Northouse, P. G. (2022). *Leadership: Theory and practice* (9th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nurhikmah, A. R., Nugrahaningtyas, N., & Pamungkas, A. (2021). Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. *Jurnal Pancasila*, 9.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Social cohesion and identity-based conflict*. Paris: OECD Publishing.
- Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2018). How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic tests of three mediators. *European Journal of Social Psychology*, 38(6), 922–934. <https://doi.org/10.1002/ejsp.504>
- Rawls, J. (2005). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sandy, A. F. (n.d.). Pengaruh Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Jiwa Kewarganegaraan Generasi Muda Di Indonesia. *Borneo Law Review*, 7.
- Sari, M., & Sundawa, D. (2025). Disintegrasi Nasional Dalam Perspektif Filsafat Pancasila. *CIVICUS : Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2.
- Sulaiman, R. (2017). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Menuju Stabilitas NKRI. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Human development report 2023: Breaking polarization*. New York: UNDP.
- World Bank. (2024). *Governance and stability in developing countries*. Washington, DC: World Bank.
- Yanto, D. (2016). Pengalaman Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Dalam Kehidupan Sehari-hari. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 6.